



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang  
Telp. (0711) 355386-358433 Fax. (0711) 378384  
e-mail: [kanwilsumsel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.6-PR.04.02-0047

10 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Tahunan Kantor  
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM R.I.  
di Jakarta

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ilham Djaya

NIP 196412201991031002

Tembusan:  
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.



# LAPORAN TAHUNAN

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM SUMATERA  
SELATAN

# 2023

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. UMUM

Perwujudan good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektivitas dan penegakan supremasi hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan HAM, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban yang dalam hal ini adalah Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Adapun pelaporan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selama satu tahun termasuk capaian kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan masukan dan bahan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.

#### C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selama Tahun 2023 meliputi capaian Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan Manajemen Risiko, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan capaian lainnya yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selama Tahun 2023.

#### D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.IT.01.01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024.

## BAB II

### KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

#### A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

**Visi :**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

**Misi :**

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya ialah:

- a. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- g. Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur;
- h. Meningkatkan SDM kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang unggul dan berdaya saing;
- i. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan;
- j. Meningkatkan efektivitas organisasi;
- k. Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Program Dukungan Manajemen	19.668.379.000
<b>TOTAL</b>					19.668.379.000
<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan</b>					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 indeks	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	59.743.560.600
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	8.270.270.600
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%		
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%		
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	45.820.807.000
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%		
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%		
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%		
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%		
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</li> <li>- Program Dukungan Manajemen</li> </ul>	900.312.000
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%		
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</li> <li>- Program Dukungan Manajemen</li> </ul>	2.689.586.600
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%		
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	1.901.328.600
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%		
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%		
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	59.743.560.600
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidan a/anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum - Program Dukungan Manajemen	59.743.560.600
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap	85%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib			
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</li> <li>- Program Dukungan Manajemen</li> </ul>	59.582.304.800
		Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
		Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
		Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%		
TOTAL					298.395.291.400
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>					
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	5.028.378.000
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks		
TOTAL					5.028.378.000
<b>Direktorat Jenderal AHU – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	166.793.000
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran	86%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	865.007.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah			
TOTAL					2.527.800.000
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	33 permohonan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.382.545.000
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus		
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	56.842.000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus		
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan		
TOTAL					1.439.387.000
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Program Pembentukan Regulasi	264.009.000
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan	23 orang	Program Pembentukan Regulasi	90.991.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		perundang-undangan			
TOTAL					355.000.000
BPHN – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	- Program Pembentukan Regulasi - Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	135.197.000
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	- Program Pembentukan Regulasi - Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.630.736.000
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%		
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%		
TOTAL					1.765.933.000
Direktorat Jenderal HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 instansi pemerintah	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	204.980.000

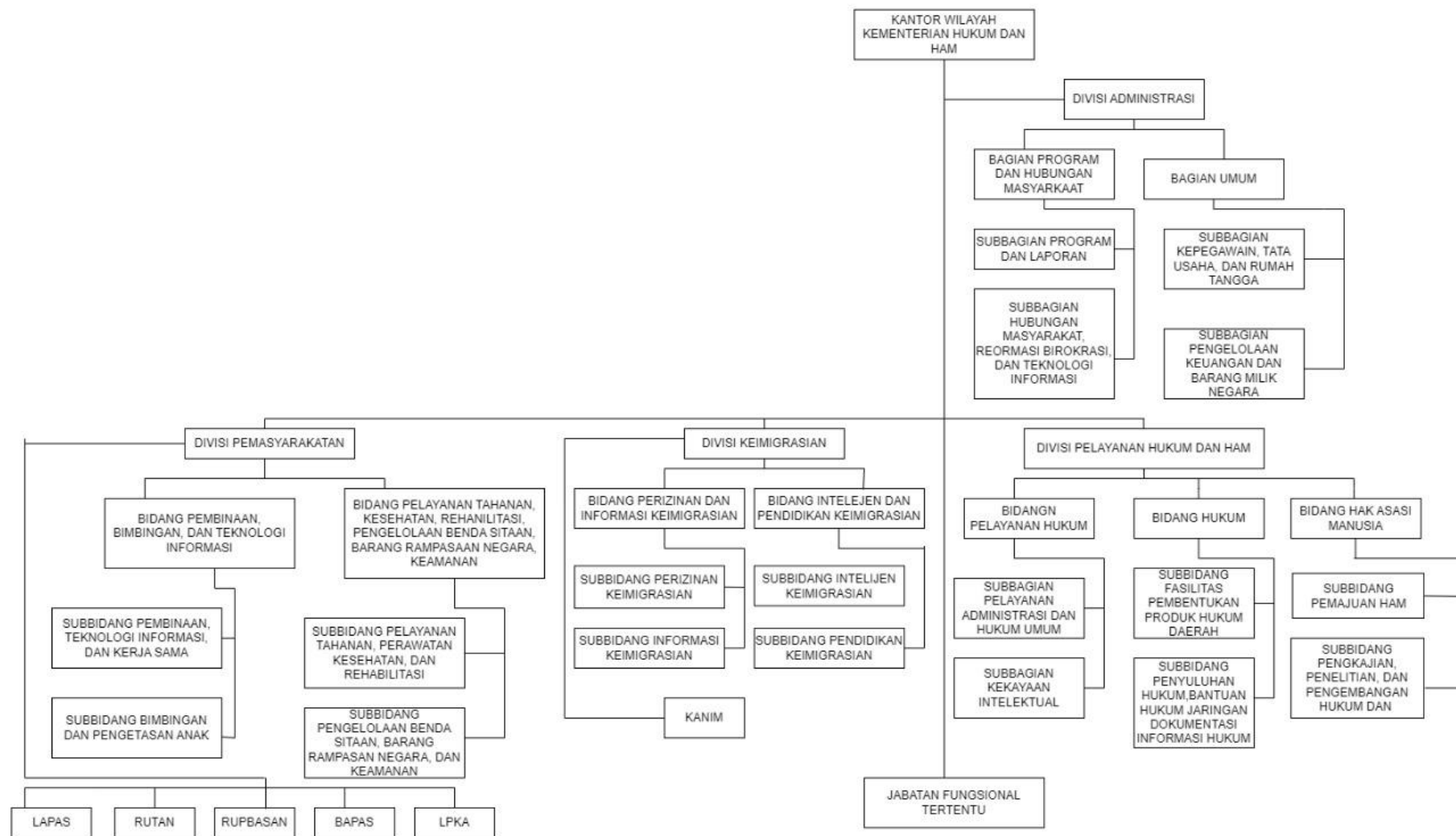
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	program aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 instansi pemerintah		
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah		
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	11.230.000
TOTAL					216.210.000
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	Program Dukungan Manajemen	214.073.000
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku		
TOTAL					214.073.000
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>329.610.451.400</b>

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



## C. SUMBER DAYA

### 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan terdiri dari 29 Satuan Kerja yang meliputi:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebanyak 26 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang;
  - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
  - c. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat;
  - d. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau;
  - e. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim;
  - f. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sekayu;
  - g. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja;
  - h. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja;
  - i. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih;
  - j. Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang;
  - k. Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang;
  - l. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang;
  - m. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja;
  - n. Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat;
  - o. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang;
  - p. Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara;
  - q. Balai Pemasarakatan Kelas II Ogan Komering Ulu Induk;
  - r. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin;
  - s. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kayu Agung;
  - t. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
  - u. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Empat Lawang;
  - v. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Surulangun Rawas;
  - w. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam;
  - x. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura;
  - y. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Dua;
  - z. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
- 3) Unit Pelaksana Teknis Imigrasi sebanyak 2 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
  - b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

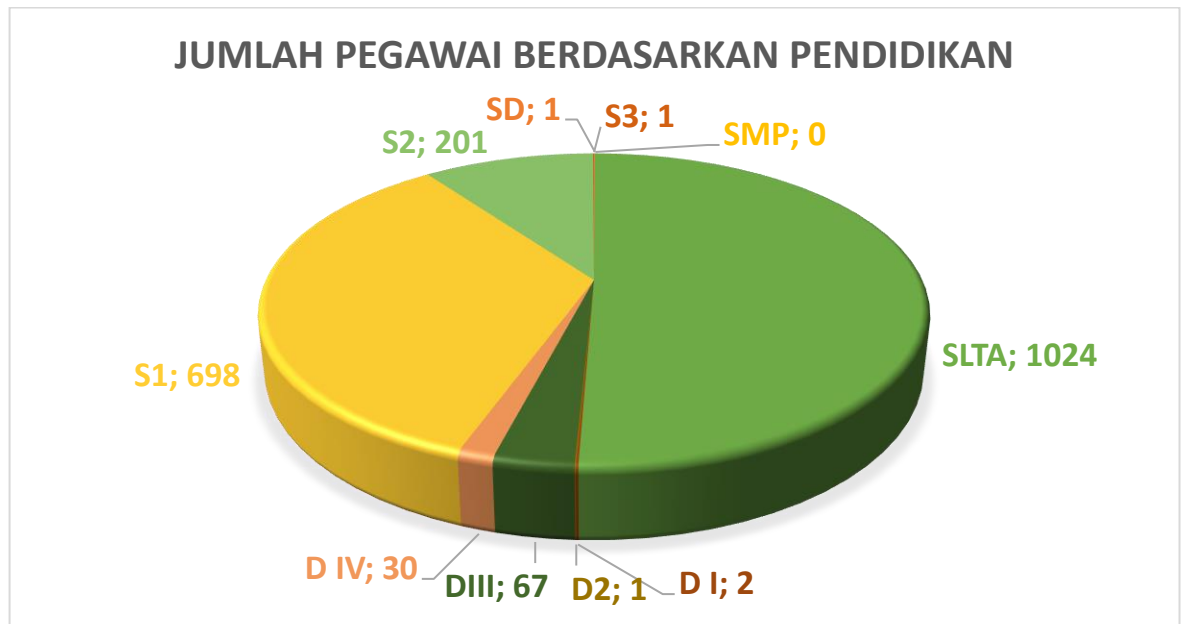


Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut.

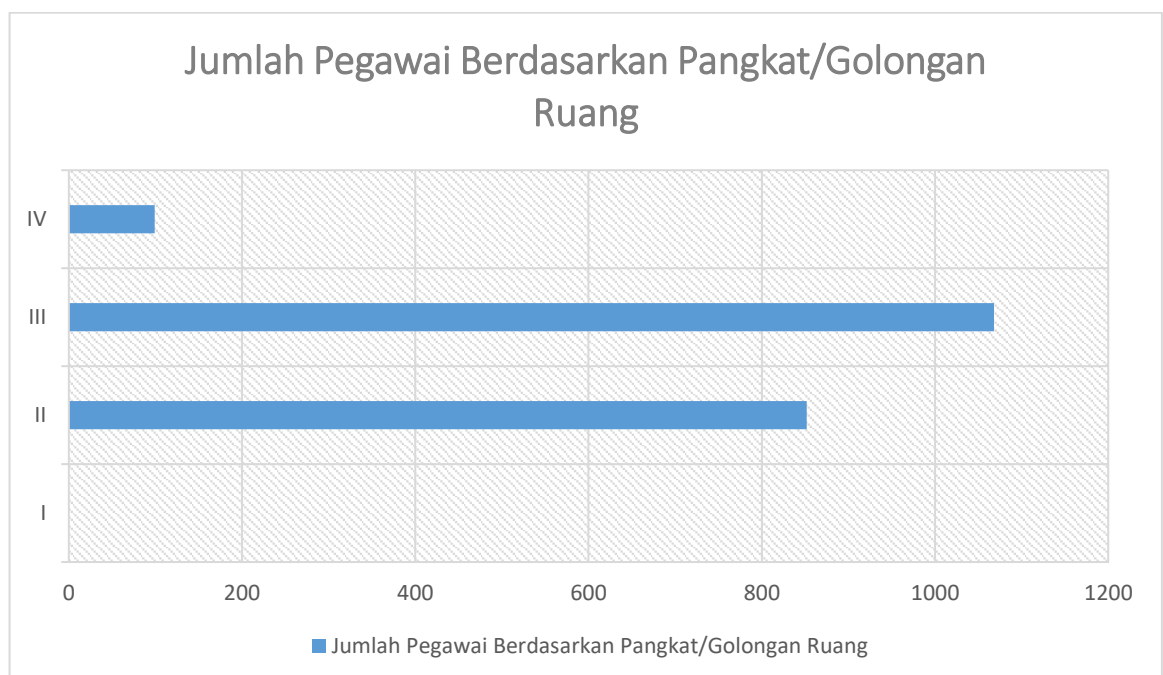
**Tabel 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	112	77	189
2	LAPAS KELAS I PALEMBANG	102	14	116
3	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	67	23	90
4	LAPAS KELAS IIA LAHAT	60	9	69
5	LAPAS KELAS IIA LUBUK LINGGAU	53	14	67
6	LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM	75	9	84
7	LAPAS KELAS IIB SEKAYU	63	4	67
8	LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA	73	10	83
9	RUTAN KELAS IIB BATURAJA	36	7	43
10	RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH	55	14	69
11	RUTAN KELAS I PALEMBANG	113	16	129
12	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	55	40	95
13	RUPBASAN KELAS I PALEMBANG	19	14	33
14	RUPBASAN KELAS II BATURAJA	10	5	15
15	KANIM KELAS I TPI PALEMBANG	47	35	82
16	KANIM KELAS II NON TPI MUARA ENIM	25	7	32
17	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	24	8	32
18	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	16	77	93
19	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUSI RAWAS UTARA	17	7	24
20	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II OGAN KOMERING ULU INDUK	16	8	24
21	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	74	10	84
22	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	73	11	84
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	75	11	86
24	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	33	4	37
25	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	28	3	31
26	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	43	6	49
27	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	60	8	68
28	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	43	4	47
29	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	86	11	97
<b>TOTAL</b>		<b>1553</b>	<b>466</b>	<b>2019</b>

**Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pendidikan**



**Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**



## 2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Telah tercapai realisasi anggaran Kantor Wilayah sebesar 99,24% atau sebanyak Rp 330.039.892.731 dari total pagu tahun 2023 sejumlah Rp 332.577.857.000. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Sumber Daya Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

No	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	Realisasi		SISA PAGU
				Jumlah	%	
1	109118	RUTAN PALEMBANG	24.230.561.000	24.142.901.276	99,64%	87.659.724
2	406369	BAPAS PALEMBANG	8.626.156.000	8.490.842.994	98,43%	135.313.006
3	406375	LAPAS PALEMBANG	24.590.911.000	24.397.033.149	99,21%	193.877.851
4	406381	LAPAS TANJUNG RAJA	14.603.932.000	14.559.374.141	99,69%	44.557.859
5	406401	LAPAS SEKAYU	14.177.517.000	13.985.292.999	98,64%	192.224.001
6	406402	LAPAS LAHAT	10.644.750.000	10.618.010.188	99,75%	26.739.812
7	406420	LAPAS MUARAENIM	17.281.590.000	17.257.993.461	99,86%	23.596.539
8	406426	LAPAS MUARADUA	6.213.873.000	6.192.679.346	99,66%	21.193.654
9	406432	LAPAS PAGAR ALAM	10.265.180.000	10.167.102.907	99,04%	98.077.093
10	406441	LAPAS EMPAT LAWANG	5.214.821.000	5.179.439.623	99,32%	35.381.377
11	406457	LAPAS LUBUK LINGGAU	16.766.469.000	16.763.222.176	99,98%	3.246.824
12	406463	LAPAS SURULANGUN RAWAS	5.339.785.000	5.320.674.890	99,64%	19.110.110
13	406472	RUTAN BATURAJA	6.939.747.000	6.933.366.843	99,91%	6.380.157
14	406488	LAPAS MARTAPURA	8.709.317.000	8.696.228.832	99,85%	13.088.168
15	406494	RUTAN PRABUMULIH	9.422.813.000	9.225.109.774	97,90%	197.703.226
16	406539	LPKA PALEMBANG	9.587.166.000	9.519.906.937	99,30%	67.259.063
17	408143	KANIM PALEMBANG	13.107.197.000	13.034.835.748	99,45%	72.361.252
18	408812	KANWIL DITJEN AHU	2.527.800.000	2.475.054.164	97,91%	52.745.836
19	408813	KANWIL DITJEN PAS	806.279.000	805.908.800	99,95%	370.200
20	408814	KANWIL DITJEN IM	1.512.625.000	1.511.593.855	99,93%	1.031.145
21	408815	KANWIL DITJEN KI	1.439.387.000	1.426.729.708	99,12%	12.657.292
22	408816	KANWIL DITJEN PP	355.000.000	353.669.400	99,63%	1.330.600
23	408817	KANWIL DITJEN HAM	216.210.000	214.485.818	99,20%	1.724.182
24	408818	KANWIL SETJEN	24.321.131.000	23.916.260.342	98,34%	404.870.658
25	408819	KANWIL BPHN	1.765.933.000	1.722.487.370	97,54%	43.445.630
26	408820	KANWIL BSK	214.073.000	213.663.175	99,81%	409.825
27	497733	LAPAS PEREMPUAN PALEMBANG	12.575.398.000	12.475.945.689	99,21%	99.452.311
28	626115	RUPBASAN PALEMBANG	3.011.090.000	2.977.702.252	98,89%	33.387.748
29	632009	BAPAS MUSI RAWAS UTARA	2.699.792.000	2.687.932.106	99,56%	11.859.894
30	632013	BAPAS OKU INDUK	2.369.365.000	2.351.488.926	99,25%	17.876.074
31	652958	LAPAS NARKOTIKA MUARA BELITI	14.012.356.000	13.903.185.021	99,22%	109.170.979
32	653108	BAPAS LAHAT	3.733.357.000	3.695.296.033	98,98%	38.060.967

No	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	Realisasi		SISA PAGU
				Jumlah	%	
33	653271	RUPBASAN BATURAJA	1.421.587.000	1.408.614.194	99,09%	12.972.806
34	664565	KANIM MUARAENIM	7.097.323.000	7.068.837.138	99,60%	28.485.862
35	683589	LAPAS BANYUASIN	16.466.041.000	16.410.484.464	99,66%	55.556.536
36	683593	LAPAS KAYU AGUNG	15.179.858.000	14.880.317.795	98,03%	299.540.205
37	683996	LAPAS NARKOTIKA BANYUASIN	15.131.467.000	15.056.221.197	99,50%	75.245.803
Total Realisasi			<b>332.577.857.000</b>	<b>330.039.892.731</b>	<b>99,24%</b>	<b>2.537.964.269</b>

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan maupun Unit Pelaksana Teknis berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

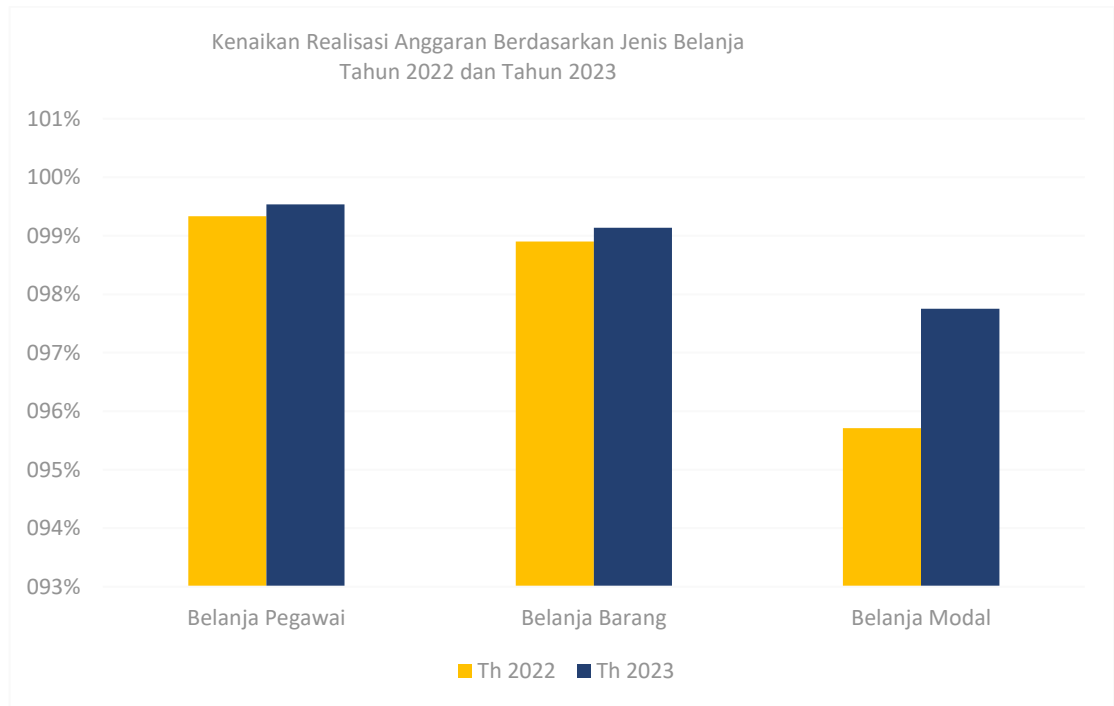
**Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja**

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>TAHUN 2022</b>				
<b>Belanja Pegawai</b>	123.416.573.000	122.596.784.120	819.788.880	99,34%
<b>Belanja Barang</b>	202.333.618.000	200.104.653.855	2.228.964.145	98,90%
<b>Belanja Modal</b>	9.218.993.000	8.823.647.218	395.345.782	95,71%
<b>Total</b>	<b>334.969.184.000</b>	<b>331.525.085.193</b>	<b>3.444.098.807</b>	<b>98,97%</b>
<b>TAHUN 2023</b>				
<b>Belanja Pegawai</b>	125.276.419.000	124.696.919.029	579.499.971	99,54%
<b>Belanja Barang</b>	195.556.924.000	193.862.498.305	1.694.425.695	99,13%
<b>Belanja Modal</b>	11.744.514.000	11.480.475.397	264.038.603	97,75%
<b>Total</b>	<b>332.577.857.000</b>	<b>330.039.892.731</b>	<b>2.537.964.269</b>	<b>99,24%</b>

Berdasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2023 untuk jenis belanja pegawai 95%, belanja barang 90%, belanja modal 90%, dan belanja bantuan sosial 95%. Penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan per 31 Desember 2023 mencapai target untuk semua jenis belanja, yaitu jenis belanja pegawai 99,54%, jenis belanja barang 99,13%, dan jenis belanja modal 97,75%.

Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja belanja modal mengalami kenaikan sebesar 2,04%.

**Gambar 4. Perbandingan Realisasi Anggaran**



#### D. PELAKSANAAN SPIP, SAKIP, REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN RISIKO

##### 1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sebagai Satuan Kerja, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa setiap Satuan Kerja wajib menyelenggarakan SPIP dan menyusun laporan penyelenggaraan tersebut secara berkala. Penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, melalui tahapan kegiatan pemahaman (*knowing*), pemetaan (*diagnostic assessment*), penilaian risiko tingkat entitas program dan kegiatan, pembangunan infrastruktur (*norming*), internalisasi/ implementasi (*forming*) dan pengembangan berkelanjutan melalui penilaian maturitas SPIP oleh APIP, menindaklanjuti rekomendasi APIP atas temuan evaluasi SPIP Inspektorat Jenderal,

menyusun laporan Triwulan SPIP, melakukan internalisasi SPIP melalui *workshop*, menyusun Rencana Aksi Rekomendasi Manajemen Risiko, melakukan monev dan menyusun Laporan Monev atas hasil rencana aksi manajemen risiko serta menyusun laporan tindaklanjut atas hasil monev rekomendasi manajemen risiko per triwulan.

2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sebagai Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyusun perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi penyusunan konsep RENSTRA yang di dalamnya memuat Aspek Strategis Organisasi, Pemasalahan Utama, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan serta menyusun Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran. Yang kemudian dilakukan monitoring atas Capaian Kinerja Organisasi melalui aplikasi SMART-DJA pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart> dan aplikasi Monev Bappenas pada website <https://e-monev.bappenas.go.id/2022> dan aplikasi E-Performance pada laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Selanjutnya dilakukan analisis atas capaian kinerja dimaksud dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebagai Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2023 yang dilakukan monitoring capaiannya per triwulan serta menginput data dukung dalam aplikasi E-RB Kemenkumham dan E-PMPRB, meliputi 8 (delapan) unsur percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik.

4. Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyusun Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 berpedoman pada Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 meliputi Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Analisis Risiko, Penanganan/Mitigasi Risiko dan Pemantauan Risiko.

## BAB III

### HASIL YANG DICAPAI

#### A. CAPAIAN KINERJA

##### 1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Secara keseluruhan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023 telah tercapai sebagaimana berikut.

**Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>		
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	125,80%
<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan</b>		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	120,17%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	103,37%
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	173,75%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	120,06%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	157,34%
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	110,73%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	115,40%
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	112,33%
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	129,72%
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	120,83%
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>		
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	-3,62%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	116,00%
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>		
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	363,64%
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	100%
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan</b>		

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	125,00%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	91,30%
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	100,00%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	194,17%
<b>Direktorat Jenderal HAM</b>		
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1263,67%
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	300,00%
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</b>		
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	112,50%

Adapun rincian capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 per indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

a) Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi

**Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,9 Indeks	125,8

b) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Divisi Pemasyarakatan

**Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 indeks	98,54 indeks	120,17
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	97,4%	108,2



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	91,7%	101,9
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	90%	100
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	142,85
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117,6
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	94,8%	111,52
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	97,98%	576,29
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	18,7%	60,3
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	76,8%	106,7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	92,10%	115,12
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	73,6%	122,7
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	94,7%	172,18
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	62%	177,14
6	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111,11
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	96,11%	106,79
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	90,32%	106,25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	96,5%	120,62
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidan a/anak pelaku gangguan kamtib	85%	94,80%	111,52
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	98,58%	123,22
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	90,90%	106,94
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	96,55%	120,68
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidan a/anak pelaku gangguan kamtib	85%	85,86%	101
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	96,55%	120,68
9	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidan a/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125
		Persentase tahanan/narapidan a/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09
		Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	92,63%	108,97
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	77,92%	97,4
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	68,65%	254,26

c) Direktorat Jenderal Keimigrasian/Divisi Keimigrasian

**Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Keimigrasian/Divisi Keimigrasian Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25 Indeks	3,95 Indeks	121,53
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,13 Indeks	3,76 Indeks	120,12

d) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

**Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-18,12%	-3,62
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86%	100%	116

e) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

**Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	33 layanan	75 layanan	227,28

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	5 lokus	500
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 lokus	100
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan	2 laporan	100

f) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

**Tabel 11. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	23 orang	21 orang	91,30

- g) Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

**Tabel 12. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 keg	2 kegiatan	100
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	90,13%	109,91
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	93,13%	116,41
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	78,04	101,69
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	142,85
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500

- h) Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

**Tabel 13. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	425
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	3 instansi pemerintah	17 instansi pemerintah	566
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah	28 instansi	2800
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	9 rekomendasi	300

- i) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

**Tabel 14. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100

## 2. CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi



monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah melaksanakan target kinerja tersebut dan telah diunggah pada laman <http://kinerja.kemenkumham.go.id> setiap bulannya.

Secara garis besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki 39 target kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

**Divisi Administrasi : 10 Target Kinerja**

- a) Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah;
- b) Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Seluruh revisi anggaran belanja modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi;
- d) Peningkatan jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan memiliki sertifikat;
- e) Inventarisasi kebutuhan revitalisasi gedung dan bangunan di lingkungan Kantor Wilayah;
- f) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di wilayah;
- g) Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
- h) Optimalisasi implementasi *Corporate University* dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM;
- i) Tata kelola digitalisasi kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah;
- j) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja.

**Divisi Keimigrasian : 3 Target Kinerja**

- a) Implementasi pengembangan layanan paspor secara kesisteman;
- b) Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan *Final Rejected* di Wilayah Indonesia;
- c) Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya.

### **Divisi Pemasyarakatan: 9 Target Kinerja**

- a) Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan;
- b) Percepatan pelaksanaan *Back to Basic* penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pemenuhan hak tahanan di Lapas dan Rutan;
- c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pengelolaan basan baran;
- d) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pemasyarakatan;
- e) Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemasyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI;
- f) Piloting penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting;
- g) Peningkatan kualitas pelayanan pembinaan narapidana;
- h) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban;
- i) Pemutakhiran data pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan.

### **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: 17 Target Kinerja**

- a) Peningkatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b) Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum;
- d) Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah;
- e) Memastikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f) Penerapan PMPJ dan pengawasan audit kepatuhan terhadap notaris;
- g) Pembaharuan data notaris & identifikasi status notaris;
- h) Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
- i) Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia;
- j) Mendorong pertumbuhan permohonan merek *One Village One Brand* dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic;

- k) Terlaksananya kegiatan- kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK;
- l) Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku;
- m) Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang;
- n) Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: sertifikasi pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota dan tradisional;
- o) Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia;
- p) Mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- q) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan selalu melakukan pengunggahan data dukung target kinerja sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

### 3. CAPAIAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI, SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN SAKIP

- Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar 88,40%. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat 3 (tiga) Satuan Kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin, dan Lapas Kelas IIB Sekayu.
- Terkait dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah dilakukan pendampingan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut:
  - ❖ Nilai Komponen Struktur dan Proses adalah 3,857 atau 1,157 (30% dari bobot hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP);
  - ❖ Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) adalah 4,422 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 4 (empat) dengan penjelasan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Memiliki kerangka

penerapan Manajemen Risiko yang berkualitas dan penyelenggaraan yang konsisten dan menyeluruh serta dapat diketahui efektivitas implementasinya.

- ❖ Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,096 atau Tahap Bekerja, dengan penjelasan bahwa risiko korupsi telah cukup terkelola dengan kebijakan dan prosedur cegah deteksi respons sudah berjalan, menjangkau seluruh kegiatan utama, cukup konsisten, termasuk adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi.
- Berdasarkan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berada pada level *RISK DEFINED* nilai 72,95.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun nilai SAKIP yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Capaian Nilai SAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

Tahun	Nilai Komponen				Nilai	Predikat
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
2022	22,20	22,50	12,30	20,00	77,00	BB
2023	27,00	27,00	13,50	20,00	87,5	A

## B. CAPAIAN LAINNYA

### 1. SMART

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan penginputan sesuai dengan timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli;
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai SMART Tahun 2023:

**Tabel 16. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2023**

NO	SATKER	Realisasi Anggaran	Konsisten RPD Akhir	Capaian Keluaran Kegiatan	Efisiensi	Nilai
1.	Sekretariat Jenderal	57,53	97,39	93,18	20,00	92,44
2.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	50,07	82,20	100,00	20,00	91,92
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	69,52	97,47	100,00	20,00	96,58
4.	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	58,91	95,18	100,00	20,00	95,14
5.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	59,83	46,82	69,14	8,47	64,76
6.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang - undangan	71,90	99,17	100,00	20,00	97,12
7.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	53,21	97,93	100,00	20,00	95,08
8.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	63,93	98,56	100,00	20,00	96,24
9.	Direktorat Jenderal Imigrasi	64,75	97,05	100,00	20,00	96,04
<b>UPT PEMASYARAKATAN</b>						
1.	Lapas Kelas I Palembang	52,32	97,07	100,00	20,00	94,84
2.	LPKA Klas I Palembang	52,67	94,21	38,35	19,77	67,37
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	46,90	97,42	49,84	20,00	72,56
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	53,24	74,48	100,00	20,00	90,82
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	50,14	89,19	10,95	-20,00	25,86
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	54,78	98,23	81,70	14,98	83,74
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	50,89	96,58	88,04	20,00	89,41
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	50,16	97,38	80,34	20,00	86,14
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	54,11	97,85	100,00	20,00	95,16
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	51,61	97,57	93,08	20,00	91,85
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	51,60	95,44	4,62	-20,00	24,38
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	24,88	64,69	4,72	8,22	36,42
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	50,89	97,59	100,00	20,00	94,80
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	56,22	70,88	3,14	-20,00	19,72
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	50,56	83,47	8,87	2,49	40,03
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	50,02	97,57	32,47	-13,89	41,10
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	16,81	58,37	1,46	-15,63	16,01

NO	SATKER	Realisasi Anggaran	Konsisten RPD Akhir	Capaian Keluaran Kegiatan	Efisiensi	Nilai
18.	Rutan Kelas I Palembang	50,88	95,28	62,68	18,39	76,99
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	50,34	97,25	100,00	20,00	94,68
20.	Rutan Kelas II Baturaja	48,09	98,00	73,23	20,00	82,96
21.	Bapas Kelas I Palembang	70,54	74,36	100,00	20,00	92,48
22.	Bapas Kelas II Lahat	68,19	80,50	7,25	-20,00	24,42
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	86,03	41,65	37,23	-20,00	32,12
24.	Bapas Kelas II Muratara	90,41	92,60	100,00	9,59	90,28
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	58,07	90,88	100,00	20,00	94,27
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	47,74	94,80	92,59	20,00	90,76
<b>UPT KEIMIGRASIAN</b>						
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	53,17	96,59	44,01	20,00	70,48
2.	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	55,05	96,58	39,33	20,00	68,63

## 2. IKPA

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2023:

**Tabel 17. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2023**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	406457	LAPAS LUBUK LINGGAU	16.766.469.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	100,00	100%	<b>100,00</b>	
2	408813	KANWIL DITJEN PAS	806.279.000	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00	80,00	80%	<b>100,00</b>	
3	683593	LAPAS KAYU AGUNG	15.179.858.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	9,77	5,00	25,00	99,77	100%	<b>99,77</b>	
4	406472	RUTAN BATURAJA	6.939.747.000	10,00	10,00	19,73	10,00	10,00	9,81	5,00	25,00	99,54	100%	<b>99,54</b>	
5	408817	KANWIL DITJEN HAM	216.210.000	10,00	9,40	20,00	0,00	0,00	9,95	5,00	25,00	79,35	80%	<b>99,19</b>	
6	406494	RUTAN PRABUMULIH	9.422.813.000	10,00	8,98	19,95	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,93	100%	<b>98,93</b>	
7	406488	LAPAS MARTAPURA	8.709.317.000	10,00	9,00	20,00	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	98,93	100%	<b>98,93</b>	
8	406402	LAPAS LAHAT	10.644.750.000	10,00	8,95	19,99	10,00	10,00	9,92	5,00	25,00	98,86	100%	<b>98,86</b>	
9	652958	LAPAS NARKOTIKA MUARA BELITI	14.012.356.000	10,00	8,87	19,90	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,77	100%	<b>98,77</b>	
10	406375	LAPAS PALEMBANG	24.590.911.000	10,00	8,85	20,00	10,00	10,00	9,85	5,00	25,00	98,70	100%	<b>98,70</b>	
11	683589	LAPAS BANYUASIN	16.466.041.000	10,00	8,73	20,00	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	98,66	100%	<b>98,66</b>	

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
12	406420	LAPAS MUARAENIM	17.281.590.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	9,89	5,00	25,00	99,89	100%	<b>99,89</b>	
13	406463	LAPAS SURULANGUN RAWAS	5.339.785.000	10,00	8,95	19,88	10,00	10,00	9,74	5,00	25,00	98,57	100%	<b>98,57</b>	
14	408820	KANWIL BSK	214.073.000	10,00	8,81	20,00	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00	78,81	80%	<b>98,51</b>	
15	408816	KANWIL DITJEN PP	355.000.000	10,00	8,83	20,00	0,00	0,00	9,95	5,00	25,00	78,78	80%	<b>98,48</b>	
16	408815	KANWIL DITJEN KI	1.439.387.000	10,00	8,54	20,00	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00	88,54	90%	<b>98,38</b>	
17	408812	KANWIL DITJEN AHU	2.527.800.000	10,00	8,50	20,00	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00	88,50	90%	<b>98,33</b>	
18	664565	KANIM MUARAENIM	7.097.323.000	10,00	8,75	20,00	9,70	10,00	9,88	5,00	25,00	98,33	100%	<b>98,33</b>	
19	406539	LPKA PALEMBANG	9.587.166.000	10,00	8,30	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,30	100%	<b>98,30</b>	
20	497733	LAPAS PEREMPUAN PALEMBANG	12.575.398.000	10,00	8,81	19,92	10,00	10,00	9,55	5,00	25,00	98,28	100%	<b>98,28</b>	
21	406426	LAPAS MUARADUA	6.213.873.000	10,00	8,19	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,19	100%	<b>98,19</b>	
22	406381	LAPAS TANJUNG RAJA	14.603.932.000	10,00	8,66	20,00	9,70	10,00	9,81	5,00	25,00	98,17	100%	<b>98,17</b>	
23	408143	KANIM PALEMBANG	13.107.197.000	10,00	9,21	20,00	9,70	10,00	9,21	5,00	25,00	98,12	100%	<b>98,12</b>	



No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
24	408818	KANWIL SETJEN	24.321.131.000	10,00	9,14	20,00	9,40	10,00	9,47	5,00	25,00	98,01	100%	<b>98,01</b>	
25	406441	LAPAS EMPAT LAWANG	5.214.821.000	10,00	7,65	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	97,65	100%	<b>97,65</b>	
26	653271	RUPBASAN BATURAJA	1.421.587.000	10,00	8,77	19,32	0,00	0,00	9,99	5,00	25,00	78,08	80%	<b>97,60</b>	
27	109118	RUTAN PALEMBANG	24.230.561.000	10,00	8,56	20,00	9,40	10,00	9,63	5,00	25,00	97,59	100%	<b>97,59</b>	
28	653108	BAPAS LAHAT	3.733.357.000	10,00	8,37	20,00	9,40	10,00	9,73	5,00	25,00	97,50	100%	<b>97,50</b>	
29	683996	LAPAS NARKOTIKA BANYUASIN	15.131.467.000	10,00	7,92	19,58	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	97,43	100%	<b>97,43</b>	
30	408814	KANWIL DJENIM	1.512.625.000	10,00	7,89	20,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	67,89	70%	<b>96,99</b>	
31	632009	BAPAS MUSI RAWAS UTARA	2.699.792.000	10,00	6,81	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	96,81	100%	<b>96,81</b>	
32	406369	BAPAS PALEMBANG	8.626.156.000	10,00	6,96	20,00	10,00	10,00	9,84	5,00	25,00	96,80	100%	<b>96,80</b>	
33	626115	RUPBASAN PALEMBANG	3.011.090.000	10,00	6,87	20,00	10,00	10,00	8,83	5,00	25,00	95,70	100%	<b>95,70</b>	

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM				
34	408819	KANWIL BPHN	1.765.933.000	10,00	6,82	20,00	0,00	0,00	9,71	5,00	25,00	76,53	80%	<b>95,66</b>
35	632013	BAPAS OKU INDUK	2.369.365.000	10,00	7,64	17,90	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00	75,54	80%	<b>94,43</b>
36	406432	LAPAS PAGAR ALAM	10.265.180.000	10,00	6,40	17,85	9,70	10,00	9,93	5,00	25,00	93,88	100%	<b>93,88</b>
37	406401	LAPAS SEKAYU	14.177.517.000	10,00	9,32	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	99,32	100%	<b>99,32</b>
<b>RATA - RATA NILAI IKPA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN</b>														<b>98,06</b>

3. KEPATUHAN PELAPORAN LHKASN DAN LHKPN

a) LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)

Tabel 18. Pelaporan LHKASN Tahun 2023

TAHUN	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	KEPATUHAN	TERVERIFIKASI LENGKAP
2023	1880	1880	100%	1880

b) LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara)

Gambar 5. Pelaporan LHKPN Tahun 2023



4. SURVEI LAYANAN INTERNAL

Nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah diperoleh dari survey Balitbangkumham yang dilaksanakan setiap bulan. Adapun nilai 3,9 merupakan hasil dari rata-rata nilai indeks Bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 19. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2023**

No.	Bulan	Nilai Indeks	Nilai Konversi
1	Januari 2023	97,32	3,89
2	Februari 2023	97,32	3,89
3	Maret 2023	98,36	3,93
4	April 2023	98,38	3,93
5	Mei 2023	99,08	3,99
6	Juni 2023	95,41	3,81
7	Juli 2023	97,22	3,81
8	Agustus 2023	97,97	3,91
9	September 2023	98,23	3,92
10	Oktober 2023	97,61	3,90
11	November 2023	98,32	3,93
12	Desember 2023	97,61	3,90
<b>RATA-RATA</b>		<b>97,73</b>	<b>3,90</b>

Adapun nilai yang dihasilkan secara otomatis pada aplikasi survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM adalah dalam skala 100, sehingga untuk memperoleh nilai dalam skala 4 sebagaimana target pada Perjanjian Kinerja maka perlu dilakukan konversi nilai dengan membaginya dengan angka 25, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai Konversi} = \frac{\text{Nilai indeks}}{25}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai indeks kepuasan layanan internal Tahun 2023 adalah 3,90 indeks. Berikut ini merupakan komponen penilaian pada survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

**Tabel 20. Komponen Penilaian pada Survey 3AS oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM**

Indikator	Variabel
Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi (Index Sistem Anti Korupsi)	Transparansi
	Menerima Imbalan
	Perlakuan yang Sama
	Prosedur
	Privasi Pelapor
	Proses Pelanggaran
	Pencegahan Korupsi
Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM (Index SDM)	Penerimaan Pegawai
	Penempatan
	Promosi Jabatan
	Pengembangan Kompetensi

Indikator	Variabel
	Kenaikan Pangkat
	Gaji
	Presensi Pegawai
Integritas dan Pelaksanaan Anggaran (Index Anggaran)	Perjalanan Dinas
	PBJ
	Honorarium
	Bukti Transaksi
Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma (Index Aturan dan Norma)	Tanggung Jawab
	Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
	Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
	Kode Etik

## 5. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

**Tabel 21. Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2023**

DIVISI ADMINISTRASI		
NO	PENGHARGAAN	FOTO PENGHARGAAN
1.	Terbaik Pertama Kategori Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Terbaik - Pagu Kecil Periode Semester I tahun 2023	
2.	Terbaik Kedua Satuan Kerja dengan Kinerja Akurasi Perencanaan Penarikan Dana Kategori Pagu Sedang Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil DJPB Sumatera Selatan	

3.	3 (Tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memperoleh Predikat WBK	Sebanyak 3 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin dan Lapas Kelas IIB Sekayu.
4.	Penghargaan Pelaporan Harta Kekayaan ASN Tercepat, Persentase Pengunggahan BPE SPT, dan Terverifikasi Lengkap dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham pada tanggal 8 November 2023	<p><b>Terbaik Ke-3</b> Kategori Pelaporan Harta Kekayaan ASN Tercepat, Persentase Pengunggahan BPE SPT, dan Terverifikasi <b>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan</b></p> 
5.	Penghargaan Sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ketiga (Ke-3) Kategori Pagu Sedang Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil DJPB Sumatera Selatan	
<b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>		
6.	Anugrah Paralegal Justice Award tahun 2023  2 Kelurahan di Sumsel meraih Anugrah Paralegal Justice Award	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Balai Agung, Kab. Musi Banyuasin</li> <li>- Kelurahan Lubuk Kupang, Kota Lubuklinggau</li> </ul>	<a href="https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6136-kemenkumham-sumsel-dukung-peran-lurah-kades-di-sumsel-sebagai-paralegal">https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6136-kemenkumham-sumsel-dukung-peran-lurah-kades-di-sumsel-sebagai-paralegal</a>
<p>7.</p>	<p>Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023</p> <p>Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel Meraih <b>Peringkat Pertama</b> dan <b>Peringkat Kedua</b> ajang LDCC Awards Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terbaik Pertama:</b> Hanggi Dyah Arini</li> <li>- <b>Terbaik Kedua:</b> Dian Merdiansyah</li> </ul>	 <p><a href="https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6416-penyuluh-hukum-kanwil-kemenkumham-sumsel-raih-penghargaan-ldcc-awards-tahun-2023">https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6416-penyuluh-hukum-kanwil-kemenkumham-sumsel-raih-penghargaan-ldcc-awards-tahun-2023</a></p>
<p>8.</p>	<p>Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM Kanwil Sumsel dan 7 Satuan Kerja sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM</p>	
<p>9.</p>	<p>Penghargaan Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2023.</p> <p>Penghargaan Kantor Wilayah dengan Kategori Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual.</p>	

		<a href="https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6451-kanwil-kemenkumham-sumsel-terima-penghargaan-inovasi-layanan-kekayaan-intelektual-2023">https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6451-kanwil-kemenkumham-sumsel-terima-penghargaan-inovasi-layanan-kekayaan-intelektual-2023</a>
10.	<p>Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan meraih nominasi penghargaan Peringkat II Anugerah Legislasi Tahun 2023 Kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Golongan II Tahun 2023</p>	 <p><a href="https://www.kompas.tv/regional/462722/kemenkumham-sumsel-peroleh-penghargaan?medium=whatsapp">https://www.kompas.tv/regional/462722/kemenkumham-sumsel-peroleh-penghargaan?medium=whatsapp</a></p>



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja. Bahkan, terdapat beberapa indikator yang telah melebihi target itu sendiri. Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan untuk semua jenis belanja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2023 pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,20% dibandingkan tahun tahun 2022, pada jenis belanja barang mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan pada jenis belanja modal mengalami kenaikan sebesar 2,04%.

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, SPIP, Manajemen Risiko dan SAKIP serta target kinerja juga sudah memperoleh nilai baik. Disamping itu, capaian kinerja lainnya seperti SMART DJA dan IKPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah memperoleh nilai yang baik. Pelaporan LHKASN dan juga LHKPN tahun 2023 telah mencapai nilai 100%. Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah meraih berbagai prestasi penghargaan. Meski demikian, masih diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

#### B. KENDALA

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di antaranya adalah sebagai berikut.

- Divisi Administrasi:
  - Terbatasnya ketersediaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada e-katalog sehingga upaya dalam rangka mendukung terlaksananya Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi belum optimal
- Divisi Pemasyarakatan
  - Masih terdapat *overstaying* (kelebihan masa huni tahanan) pada Lapas/Rutan yang berada di Sumatera Selatan

- Masih terdapat *over capacity* (kelebihan kapasitas Warga Binaan) pada Lapas/Rutan yang berada di Sumatera Selatan
- Masih terdapat Warga Binaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PEMILU 2024 antara lain disebabkan alamat pada KTP tidak sesuai dengan domisili, NIK ganda, data tidak lengkap, penghuni Lapas/Rutan yang fluktuatif, sering terjadi pemindahan antar Rutan/Lapas, dan lain sebagainya
- Divisi Keimigrasian
  - Sering terjadinya error pada Aplikasi Layanan Paspur Online (APAPO) dan M-Paspur;
  - Keterbatasan kuota permohonan Paspur secara online melalui Aplikasi M-Paspur yang dibuka dalam kurun waktu per 2 minggu;
  - Telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pendirian Unit Kerja Keimigrasian Musi Banyuasin di Kabupaten Sekayu dan Kota Lubuk Linggau, tetapi belum bisa beroperasi secara optimal dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pelayanan Keimigrasian;
  - Belum sepenuhnya dilaksanakan pelaporan keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) oleh pihak Hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera Selatan;
  - Tidak pastinya jadwal persetujuan Maksimum Pencairan (MP) atas anggaran PNP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai kalender kerja.
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
  - Banyak Pemerintah Daerah yang masih kurang peka tentang tugas dan fungsi dari Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah;
  - Masih ada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam pembentukan produk hukum daerah.

### C. SARAN

1. Diperlukan upaya-upaya peningkatan PNPB khususnya dalam bidang Administrasi Hukum Umum melalui sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengenai pelayanan jasa Administrasi Hukum Umum;

2. Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
3. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023 dibuat, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kiranya laporan ini sebagai perwujudan akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ilham Djaya

NIP 196412201991031002